

Nama : Alfiya Nadhira Syifa

NPM : 2413031037

Kelas : 2024 B

Mata Kuliah : Teori Akuntansi

CASE STUDY

1. Keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar (fair value) untuk menilai pesawatnya memang sejalan dengan prinsip IFRS yang menekankan relevansi informasi bagi investor, terutama untuk menarik minat investor global. Namun, dalam konteks Indonesia, keputusan ini belum sepenuhnya tepat secara konseptual karena pasar pesawat di Indonesia tidak aktif dan data penilaian sulit diverifikasi. Berdasarkan kerangka konseptual PSAK dan IFRS, penggunaan nilai wajar hanya dapat dibenarkan jika pengukurannya dapat diandalkan (reliable) dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Jika nilai wajar diperoleh dari asumsi subjektif tanpa pasar aktif, maka penyajian laporan keuangan tidak lagi memenuhi prinsip *faithful representation*. Oleh karena itu, penggunaan biaya historis (*historical cost*) lebih sesuai untuk menjaga keandalan dan kehati-hatian laporan keuangan di Indonesia.
2. Secara umum, kerangka konseptual PSAK dan IFRS memiliki dasar yang hampir sama karena PSAK sudah mengonvergensi ke IFRS, namun terdapat perbedaan dalam penerapannya. Tujuan laporan keuangan pada keduanya adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal, tetapi PSAK lebih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional, sementara IFRS bersifat global. Karakteristik kualitatif utama keduanya sama, yaitu relevansi dan penyajian yang jujur (*faithful representation*), hanya saja IFRS lebih fleksibel dalam penggunaan pertimbangan profesional. Dalam hal basis pengukuran, IFRS lebih mendorong penggunaan nilai wajar jika dapat diukur dengan andal, sedangkan PSAK lebih berhati-hati dan mengutamakan biaya historis. Keduanya juga sama-sama

berasumsi bahwa entitas akan terus beroperasi (going concern), kecuali ada indikasi kuat sebaliknya.

3. Saya kurang setuju jika Indonesia sepenuhnya menerapkan IFRS tanpa adanya penyesuaian terhadap kondisi lokal. Memang, penerapan IFRS secara global dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dan menarik minat investor asing, namun situasi ekonomi dan tingkat kematangan pasar di Indonesia belum sepenuhnya mendukung hal tersebut. Banyak aset di Indonesia, seperti pesawat atau properti tertentu, tidak memiliki pasar aktif sehingga penentuan nilai wajarnya sering kali bergantung pada perkiraan dan asumsi yang kurang andal. Selain itu, keterbatasan jumlah penilai profesional, biaya penerapan standar yang tinggi, serta sistem pengawasan dan penegakan aturan yang belum merata juga menjadi kendala. Oleh karena itu, langkah yang paling bijak adalah tetap mengadopsi prinsip IFRS namun dengan penyesuaian lokal yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial Indonesia, sambil memperkuat kemampuan regulator, akuntan, dan penilai agar penerapan standar internasional dapat berjalan efektif dan realistis.